

STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DENGAN POLA AGROFORESTRY DI DESA AMAL KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA

Syahrizal

icanrizal@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

Development of community forest with agroforestry system is in compliance with forestry implementation, by considering aspiration and participation of community. The study was conducted by using survey method at study site and closed interview with key informans, i.e: farmer, community leader, NGO, decision maker in the village. The result of study showed that community forest might be have high potency to be developed based on the large area of degraded by planting local trees in agroforestry system. Therefore, forest should be sustained by planty local trees either in natural forest or in plantation by growing local trees in agroforestry system might increase the community income.

Keywords: *Agroforestry, Community Forest, Local Trees Species*

Hutan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan fungsi hutan yaitu dibagi menjadi produksi, lindung, konservasi dan lain - lain. Berdasarkan strategi pembangunan jangka panjang kehutanan, hutan yang sudah tidak produktif akan dioptimalkan fungsinya kembali, oleh pemerintah hutan dimanfaatkan sebagai hutan tanaman (Anjasari, 2009).

Ruhimat (2004) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama mengenal program Konservasi dan Rehabilitasi Lahan seperti program penghijauan, penanaman sejuta hektar, rehabilitasi lahan kritis, reboisasi dan Agroforestry.

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan menggunakan pola Agroforestry sejalan dengan landasan utama penyelenggaraan kehutanan yaitu memperhatikan aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat. Bahkan Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (pasal 70 UU Kehutanan No.41 Tahun 1999).

Kabupaten Donggala memiliki Kawasan Hutan seluas 485.634,4 Ha, yang terdiri dari; Hutan Produksi (HP) seluas 197.144,49 Ha merupakan fungsi kawasan yang terluas di Kabupaten Donggala, kemudian Areal Penggunaan Lain (APL) atau Luar Kawasan

Hutan seluas 167.137,17 Ha, selanjutnya urutan ketiga adalah Hutan Lindung (HL) yaitu seluas 91.648,30 ha sementara Hutan Konservasi (HK) hanya seluas 21.895,33 ha, terdapat pula kawasan Perairan Darat (PD) yang luasnya hanya mencapai 2807,522 Ha (Dishutbun Donggala 2012). Potensi tersebut memberi peluang untuk dikembangkan hal ini dilakukan karena ketersediaan kayu yang semakin kurang akibat pembalakan liar baik yang dilakukan oleh industri maupun oleh masyarakat secara berkelompok atau individu.

Kerusakan hutan di wilayah kabupaten Donggala setiap tahunnya terus meningkat baik yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan maupun oleh pihak swasta dalam hal ini pemegang izin diantaranya izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Izin Pengelolaan Kayu (IPK) dan Izin Pengelolaan Kayu Rakyat (IPKR) yang mana lokasi perambahan hutan sudah semakin dekat dengan pemukiman warga hal ini mengakibatkan lahan yang ditinggalkan menjadi kritis yang secara otomatis mengurangi tegakan pohon di dalamnya dimana rata-rata adalah jenis kayu lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan, disamping potensi lahan yang luas sepanjang das dan disekitar daerah irigasi khususnya

wilayah kecamatan sindue yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat, untuk itu perlu dilakukan tindakan atau kebijakan melestarikan kawasan hutan dengan pemanfaatan kayu lokal yang sudah ada baik yang tumbuh secara alami atau yang ditanam oleh masyarakat, sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari pengelolaan hutan secara sembarangan tersebut dapat menimbulkan tanah dan lahan menjadi kritis, kebakaran hutan, kabut asap dll (Kusnanta, 2002) sehingga perlu dilakukan strategi dengan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) melalui pola Agroforestry sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zain (1998) menyatakan rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan lahan dengan melakukan penanaman pohon dan konservasi tanah. Tujuan dari Penelitian ini adalah: (1) mengetahui strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry dan (2) menemukan pola Agroforestry yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu bulan Juli - September 2014. Wilayah penelitian untuk pengambilan data di laksanakan Kecamatan Sindue Desa Amal. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui pengamatan langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari 36 responden dan informan kunci di lapangan, melalui wawancara tertutup berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya baik berupa

daftar pertanyaan bagi petani, tokoh masyarakat, LSM, pemangku kebijakan di Desa

Sementara data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang telah tersedia dalam bentuk dokumen dan studi literatur. Inventarisasi dan penelusuran data sekunder ini dilakukan terhadap instansi-instansi yang meliputi: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, BP2HP XIV Palu dan BPDAS Palu-Poso yang berjumlah 9 orang.

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi (Rangkuti 2004), penggabungan faktor – faktor internal dan eksternal tersebut akan menghasilkan bentuk – bentuk strategi yang implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat (Rangkuti, 1977).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat digambarkan aspek-aspek lingkungan internal yang merupakan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), juga aspek-aspek eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam upaya pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola agroforestry, karakteristik petani responden di Desa Amal Kecamatan Sindue meliputi: umur responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan dan pengalaman berusahatani.

Faktor Internal

Hasil identifikasi faktor internal diperoleh klasifikasi faktor internal seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Faktor Internal

No	Faktor Internal
1.	Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan rintisan HKM b. Master Plan Perencanaan Pengelolaan HKM c. Pengalaman Berusaha Tani Cukup Tinggi d. Tenaga Kerja Keluarga dalam Pengelolaan HKM Cukup Tersedia
2.	Kelemahan (<i>Weakness</i>) <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan masyarakat desa (kelompok tani hutan) masih lemah b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah c. Masyarakat Masih Kurang Proaktif dalam Pengelolaan HKM d. Kekosmopolitan Masyarakat Masih Rendah

Setelah faktor-faktor strategis internal teridentifikasi, selanjutnya dibuat Tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*). Berdasarkan hasil perhitungan setiap rating, maka diperoleh pembobotan untuk masing-masing nilai rating faktor internal disajikan

dalam Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) pada Tabel 2, terlihat bahwa faktor kekuatan (*Strengths*) mempunyai nilai sebesar 1,35, dengan kelemahan (*Weakness*) mempunyai nilai sebesar 0,93.

Tabel 2. Matriks Hasil Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
Kekuatan (Strengths)			
1. Dukungan kebijakan pemerintah dalam Pengelolaan rintisan Hkm	0,06	4	0,23
2. Master Plan Perencanaan pengelolaan tanaman lokal kehutanan	0,08	4	0,30
3. Pengalaman Berusahatani Hutan cukup tinggi	0,06	4	0,22
4. Tenaga kerja keluarga cukup tersedia	0,15	4	0,60
Sub Total	0,34	16	1,35
Kelemahan (Weakness)			
1. Kelembagaan masyarakat desa/kelompok tani hutan masih lemah	0,07	2	0,13
2. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	0,22	1	0,29
3. Masyarakat Kurang Proaktif dalam pengembangan tanaman lokal kehutanan	0,18	2	0,31
4. Kekosmopolitan masyarakat masih rendah	0,19	1	0,19
Sub Total	0,66	6	0,93
Total	1,00	22	2,28

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014

Hasil perhitungan dari nilai skor faktor lingkungan internal dalam strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry di Desa Amal, yaitu faktor kekuatan (*strenght*) dikurangi dengan faktor kelemahan (*weakness*) diperoleh nilai X sebagai sumbu horizontal = $1,35 - 0,93 =$

0,48 dengan demikian, nilai sumbu X dalam diagram SWOT adalah sebesar 0,48.

Faktor Eksternal

Hasil Identifikasi diperoleh klasifikasi faktor eksternal seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Identifikasi Faktor Eksternal Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan Pola Agroforestry di Desa Amal Kecamatan Sindue 2014.

No.	Faktor Eksternal
1	Peluang a. Potensi Sumber pendapatan masyarakat b. Potensi penggunaan, dan pemanfaatan fungsi lahan c. Kesesuaian lahan dan jenis tanaman lokal yang diusahakan di kawasan areal HKm d. Implementasi perencanaan pengelolaan HKm melalui pola AF
2	Ancaman a. Tingginya Degradasi hutan akibat pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) dan perambahan hutan b. Tata kelola lahan hutan masih lemah c. Masih adanya konflik penguasaan lahan hutan d. Jumlah penduduk dan kemiskinan yang cukup tinggi

Sumber data; Primer setelah diolah, 2014

Tabel 3 menunjukkan faktor eksternal yang menggambarkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Setelah faktor-faktor strategis eksternal teridentifikasi, selanjutnya dibuat Tabel EFAS (*External Factor Analysis Summary*). Berdasarkan hasil perhitungan setiap rating, maka diperoleh pembobotan untuk masing-masing nilai rating faktor internal disajikan dalam Tabel 4. Berdasarkan hasil analisis *Enternal Factor Analysis Summary* (EFAS) pada Tabel

4 terlihat bahwa faktor peluang (*Opportunities*) mempunyai nilai sebesar 1,01, dengan ancaman (*Threats*) mempunyai nilai sebesar 1,96. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry memiliki peluang yang lebih rendah yaitu 1,01 persen dibandingkan dengan ancaman sebesar 1,96 persen, sehingga pengembangan strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry masih perlu dilakukan.

Tabel 4. Matriks Hasil Analisis *External Factor Analysis Summary* (EFAS)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
Peluang (Opportunity)			
1. Potensi Sumber Pendapatan masyarakat	0,04	4	0,15
2. Potensi penggunaan dan pemanfaatan fungsi hutan	0,07	3	0,21
3. Kesesuaian lahan, jenis tanaman yang diusahakan di kawasan areal HKm	0,05	4	0,21
4. Implementasi penancangan HKM dengan pola Agroforestry	0,15	3	0,45
Sub Total	0,31	14	1,01
Ancaman (Threat)			
1. Tingginya degradasi hutan akibat pembalakan liar dan perambahan hutan	0,07	3	0,22
2. Tata kelola lahan hutan masyarakat masih rendah	0,23	3	0,62
3. Masih Adanya Konflik Penguasaan Lahan Hutan	0,19	3	0,52
4. Jumlah penduduk dan kemiskinan yang cukup tinggi	0,20	3	0,59
Sub Total	0,69	12	1,96
Total	1,00	26	2,97

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014

Hasil perhitungan dari nilai skor faktor lingkungan eksternal dalam strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry pada area penancangan HKm di Desa Amal Kecamatan Sindue, yaitu faktor peluang (*opportunities*) dikurangi dengan faktor ancaman (*threats*) diperoleh nilai X sebagai sumbu horizontal = $1,01 - 1,96 = -0,95$. Dengan demikian, nilai sumbu Y dalam diagram SWOT adalah sebesar $-0,95$.

Hasil perhitungan matriks IFAS (*Internal Strategic Faktor Analisis Summary*) dan matrik EFAS (*Eksternal Strategic Faktor Analisis Summary*) yang menghasilkan nilai sumbu X merupakan hasil pengurangan antara faktor kekuatan (1,35), dan faktor kelemahan (0,93) dari lingkungan internal yaitu sebesar 0,48 dan nilai sumbu Y yang merupakan hasil pengurangan antara faktor peluang (1,01) dan faktor ancaman (1,96) dari lingkungan eksternal yaitu sebesar -0,95, sehingga dapat digambarkan dalam diagram SWOT pada Gambar 1

<p>3. Kesesuaian lahan dan jenis tanaman yang diusahakan di kawasan areal Hkm</p> <p>4. Implementasi penancangan HKm dengan pola AF</p>	<p>pemanfaatan kawasan HKm untuk pengembangan jenis tanaman kayu dan non kayu sesuai dengan kondisi lahan hutan kemasyaratan</p> <p>3. Implementasi program kegiatan pengembangan tanaman lokal kehutanan dengan pola agroforestri</p> <p>4. Dukungan perundangan tentang HKm sebagai bahan rujukan institusi</p>	<p>3. Optmalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanaman lokal kehutanan dengan pola AF</p> <p>4. Peningkatan akses informasi dan teknologi, sarana prasarana serta insentif bagi pengelola dan masyarakat.</p>
<p>Threats (T)</p> <p>1. Tingginya degradasi hutan akibat adanya pembalakan liar(ilegal logging)</p> <p>2. Tata kelola lahan hutan yang masih lemah</p> <p>3. Adanya konflik penggunaan lahan hutan</p> <p>4. Jumlah penduduk dan kemiskinan yang cukup tinggi</p>	<p>Strategi ST</p> <p>1. Peningkatan Penerapan kebijakan Penegakkan hukum dalam menekan laju penyebab degradasi lahan yang dilakukan oleh para pihak;</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses penancangan HKm melalui pola AF</p> <p>3. Peningkatan dan pemantapan tata kelola lahan hutan lindung sesuai fungsi ekonomis, sosial dan ekologi hutan</p> <p>4. Optimalisasi kegiatan koordinasi antar masyarakat yang terkait dalam persamaan persepsi pengelolaan HKm</p> <p>5. Peningkatan kemampuan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya masyarakat Di areal penancangan HKm</p>	<p>Strategi WT</p> <p>1. Mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dengan membangun kemitraan dengan swasta.</p> <p>2. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM lokal dalam pengelolaan HKm melalui training-training dan kursus serta magang</p> <p>3. Mengembangkan dan mendorong lembaga-lembaga keuangan masyarakat seperti koperasi dll dalam berinvestasi</p> <p>4. Mendorong pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>

Berdasarkan matriks SWOT pada Tabel 5, maka dalam strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Agroforestry pada lokasi penancangan HKm di Desa Amal Kecamatan Sindue digunakan Strategi ST dengan melakukan kegiatan operasional :

1. Peningkatan Penerapan dan kebijakan Penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam menekan laju penyebab degradasi lahan.

- a) Reskrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan;
- b) Pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu ilegal;
- c) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan;
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan;

- e) Pemberian sanksi hukum tegas tanpa memandang status ekonomi pelaku pembalakan liar dan perambahan hutan;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan pola agroforestri;
 - a) Pembinaan Masyarakat Desa secara terpadu dan holistik dalam proses pengembangan Hutan Kemasyarakatan;
 - b) Mengembangkan tata ruang kawasan yang dinaunginya bersama masyarakat untuk disepakati bersama,
 - c) Melakukan Evaluasi dengan melibatkan masyarakat.
3. Peningkatan dan pemantapan tata kelola lahan HKM sesuai fungsi ekonomis, sosial dan ekologi hutan
 - a) Prosperity approach (pendekatan pengelolaan budidaya;
 - b) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian izin-izin).
 - c) Mengakomodasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sesuai prinsip kelestarian, mengembangkan mekanisme pengakuan hak kelola pada areal konflik berat/ringan namun tetap mengacu pada kerangka pengelolaan hutan lestari;
 - d) Transparansi Penentuan batas-batas hutan yang dikelola dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui sosialisasi intensif; Inventarisasi, identifikasi keadaan/kondisi kawasan hutan dan permasalahannya, melakukan pendataan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar dan didalam kawasan pencanangan HKM, dan
 - e) Merekomendasikan dan mengupayakan penyelesaian hukum melalui mekanisme revisi tata ruang pada areal konflik tenurial berat yang tidak mungkin dipertahankan sebagai kawasan hutan.
4. Optimalisasi kegiatan koordinasi antar stakeholder yang terkait dalam persamaan

presepsi pengembangan Hutan Kemasyarakatan

- a) Melakukan kegiatan sosialisasi, pertemuan lintas sektor;
- b) Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta resolusi konflik lahan;
- c) Memberi jaminan dalam penanganan pengembangan Hutan Kemasyarakatan;
- d) Pemantapan pengawasan hutan oleh para stakeholder terkait dan Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan hutan.
5. Peningkatan kemampuan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya masyarakat.
 - a) Membuka akses kepada sumberdaya hutan, lahan, modal, Iptek, pasar dan lapangan kerja;
 - b) Menumbuh kembangkan kesadaran (*awareness*) akan potensi SDA dan SDM yang dimiliki, menguatkan individu dan pranata sosial masyarakat;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana fisik (listrik, irigasi dan komunikasi) dan Penyediaan sarana prasarana pelatihan (sosial, ekonomi dan teknologi dan pemasaran di pedesaan).
 - d) *Prosperity approach* (pendekatan budidaya tanaman kehutanan) dan pemberian Dana Stimulan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilaksanakan oleh Ansary dkk., (2010) dengan judul Strategi Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil analisis bahwa Pengembangan HTR perlu memperhatikan jaminan ketersediaan dan keamanan kawasan hutan, kemampuan dan kesiapan masyarakat (ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen, dan kelembagaan). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widjanto dan Gailea (2010) dengan judul Kajian Pengembangan Agroforestri Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Toranda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Propinsi

Sulawesi Tengah dinyatakan bahwa dukungan permodalan usahatani, keuntungan finansial, kesesuaian lahan, pengendalian erosi dan rehabilitasi tanah, kemitraan agribisnis, dan peran kelembagaan petani merupakan kriteria yang mempunyai bobot kepentingan tertinggi,

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dengan pola Agroforestry dimana kelembagaan masyarakat desa (kelompok tani hutan) masih lemah dengan bobot 0,13 sehingga perlu terus dilakukan pembinaan secara terus menerus kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikar dan dapat menentukan bentuk antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama Djogo., (2003) *dalam* Hakim dkk (2010). Hal terpenting lainnya adalah pemberdayaan ataupun partisipasi masyarakat hendaknya tanpa paksaan (Mubyarto, 1994).

Selain kelembagaan faktor pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Amal Kec Sindue Kabupaten Donggala hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan dengan bobot 0,29 sehingga menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan pola Agroforestry dimana Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi merupakan peralatan immaterial atau aset tidak nyata masyarakat, karena tanpa itu modal fisik tidak dapat dimanfaatkan secara produktif (veblen *dalam* Jhingan, 1990 dan Hakim, dkk, 2010)

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Amal Masih memiliki potensi dan Peluang untuk dikembangkan hasil penelitian menunjukkan potensi penggunaan dan pemanfaatan fungsi hutan memiliki bobot 0,21, penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi

dan peruntukan kawasan hutan tersebut, dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (Prastowo, 2003)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan tanaman lokal kehutanan di Desa Amal meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun kekuatan dari faktor internal masih dimiliki, maka strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
2. Pola Agroforestry yang baik untuk dikembangkan di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala khususnya di lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah dengan memanfaatkan Kekuatan / internal dan peluang / eksternal khususnya pada potensi pemanfaatan fungsi lahan dan kesesuaian lahan serta jenis tanaman yang diusahakan dikawasan Hutan Kemasyarakatan.

Rekomendasi

- 1) Diperlukan keterlibatan para pihak dan masyarakat disekitar kawasan hutan lindung sebagai pelaku pembangunan dalam pengelolaan hutan.
- 2) Penguatan kelembagaan (Kelompok tani hutan dan lembaga masyarakat desa hutan), diantaranya melalui pemberdayaan kelembagaan koperasi/ lembaga ekonomi rakyat yang bisa memberikan hasil-hasil produksi kepada petani.

DAFTAR RUJUKAN

- Anjasari, R. 2009. *Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar Ilir*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anggraeny, R Malamassam, D dan Paembonan, SA., 2010. *Strategi Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala, 2012. *Dokumen Rancangan Tahunan RHL*. Kabupaten Donggala
- Djogo, dan Hakim.,2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office. Bogor. Indonesia.
- Kusnanta. 2002. *Pengelolaan Tanah Berdasarkan Prinsip Kelestarian*. Kenari, Jakarta.
- Mubyarto. 1994. *Desa dan Perhutanan Sosial*. Adikarya Medya, Yogyakarta
- Prastowo. 2003. *Masalah Sumber Daya Air di Indonesia: Kerusakan DAS dan rendahnya Kinerja pemanfaatan air*. IPB Bogor Melalui [http://Makalah Falsafah Sains.htm](http://MakalahFalsafahSains.htm)[19/06/10]
- Rangkuti F, 1977. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ruhimat, S. I. 2004. *Strategi Penyuluhan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan*: Majalah Kenari. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Jakarta.
- Widjajanto,D., Gailea, R, 2010. *Kajian Pengembangan Agroforestri Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Toranda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah*. *J. Agroland* 15 (4) : 264 - 270, Desember 2010
- Zain, S. A. 1998. *Kamus Kehutanan*. Rineka Cipta, Jakarta